

Efek Multiplier Kebijakan Fiskal: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Struktur Akuntansi Ekonomi Rumah Tangga dan Ketahanan Fiskal Nasional

Inriyanti Assa¹, Helmin Rumbiak², Galio Burnames³, Yulianti Karoma⁴ Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

Corresponding Author: inriassa@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the fiscal policy impact of the Free Nutritious Meal Program (MBG) on macroeconomic multiplier effects and household accounting structures. Specifically, it examines the extent to which MBG creates household cash savings while identifying potential inequalities in fiscal benefits across income groups. This study employed a mixed-methods approach combining quantitative microeconomic analysis and macroeconomic literature review. The quantitative analysis used primary data from 585 households with school-aged children in Keerom Regency, particularly in the Arso area. Pearson's Chi-Square test was applied to examine the associative relationship between regular household income and the amount of consumption expenditure savings. Meanwhile, the macroeconomic analysis was conducted through a review of empirical literature and national policy evaluation reports related to sectoral multiplier effects, inflation risks, and fiscal sustainability. The findings show a highly significant associative relationship between regular household income and consumption budget savings, with a p-value of 0.000043. At the micro level, fiscal benefits were distributed unequally. Middle- to upper-income households tended to gain larger cash surpluses of more than Rp100,000 per month, while low-income households mostly recorded micro-scale savings of less than Rp50,000 per month. At the macro level, MBG has the potential to stimulate agriculture, food processing, and local MSMEs. However, universal implementation may generate hidden costs, food substitution expenses, demand-pull inflation, and fiscal pressure. MBG can create new household disposable income and stimulate the local food economy. However, universal program design remains vulnerable to budget inefficiency, unequal fiscal benefits, and fiscal sustainability risks.

Keywords: Free Nutritious Meal Program, multiplier effect, household accounting, fiscal policy, political economy.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan, tetapi juga oleh pemenuhan gizi yang memadai sejak usia dini hingga usia sekolah. Dalam konteks tersebut, Indonesia masih menghadapi persoalan struktural berupa tingginya prevalensi stunting dan malnutrisi pada anak. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia, angka stunting nasional pada tahun 2022 masih berada pada level 21,6%, yang menunjukkan bahwa persoalan gizi kronis masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan manusia Indonesia (SSGI, 2022, dalam Putri et al., 2026). Selain itu, Food and Agriculture Organization melaporkan bahwa sekitar 43,5% penduduk Indonesia belum mampu menjangkau pola makan sehat akibat keterbatasan akses dan daya beli pangan bergizi (FAO, 2023, dalam Putri et al., 2026). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga berhubungan erat dengan ketimpangan ekonomi rumah tangga.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal ekspansif. Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat produktivitas jangka panjang melalui investasi pada modal manusia. Dari sisi fiskal, MBG menjadi salah satu program berskala besar karena alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahap awal tahun 2025 mencapai Rp71 triliun dan diproyeksikan meningkat hingga Rp335 triliun pada tahun 2026 (LPEM UI, 2026; Jati et al., 2025). Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai intervensi negara dalam mengoreksi kegagalan pasar dalam penyediaan pangan bergizi yang terjangkau bagi kelompok masyarakat rentan.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik dan ekonomi rumah tangga, Program MBG dapat dipahami sebagai bentuk transfer natura (in-kind transfer) yang berpotensi mengurangi beban pengeluaran rutin keluarga, khususnya pada pos konsumsi pangan anak. Dengan adanya penyediaan makanan bergizi oleh negara, sebagian biaya yang sebelumnya ditanggung rumah tangga dapat dialihkan menjadi ruang pendapatan siap pakai atau disposable income. Ruang fiskal domestik tersebut secara teoritis dapat digunakan untuk kebutuhan lain, seperti tabungan, pendidikan, kesehatan, atau konsumsi rumah tangga lainnya. Namun, efektivitas penghematan tersebut tidak selalu merata pada seluruh kelompok pendapatan. Rumah tangga miskin dan rumah tangga menengah-atas memiliki struktur pengeluaran, kapasitas substitusi konsumsi, dan pola penghematan yang berbeda, sehingga manfaat ekonomi dari Program MBG berpotensi terdistribusi secara tidak proporsional.

Di tingkat makroekonomi, Program MBG juga diklaim mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect), terutama melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian, pangan lokal, jasa logistik, dan pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apabila rantai pasok program dikelola secara inklusif dan berbasis lokal, belanja pemerintah melalui MBG dapat mendorong perputaran ekonomi daerah serta memperkuat sektor-sektor produktif. Akan tetapi, implementasi program berskala besar juga memunculkan sejumlah risiko, antara lain inefisiensi anggaran, inclusion error atau salah sasaran penerima manfaat, kenaikan harga bahan pangan di pasar lokal, serta munculnya biaya tersembunyi (hidden costs) apabila kualitas makanan tidak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penerima manfaat (Askar et al., 2025). Risiko-risiko tersebut dapat mengurangi efektivitas MBG sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan fiskal nasional.

Kajian mengenai Program MBG sejauh ini lebih banyak menekankan dampak makroekonomi, kesehatan, dan politik anggaran. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah dampak MBG terhadap struktur akuntansi rumah tangga, terutama dalam bentuk efisiensi kas dan diferensiasi penghematan berdasarkan tingkat pendapatan, masih relatif terbatas. Padahal, analisis pada level mikro penting dilakukan untuk memahami apakah program ini benar-benar menciptakan penghematan yang signifikan bagi rumah tangga miskin atau justru memberikan surplus kas yang lebih besar kepada kelompok dengan pendapatan lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah kajian tersebut melalui analisis hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dan besaran penghematan pengeluaran rumah tangga akibat implementasi Program MBG.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap struktur akuntansi ekonomi rumah tangga dan ketahanan fiskal nasional. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk memetakan struktur efisiensi kas dan diferensiasi penghematan pengeluaran pada berbagai stratifikasi pendapatan rumah tangga di wilayah Arso; menguji hubungan asosiatif antara tingkat pendapatan keluarga dan kapasitas penghematan kas operasional domestik; serta menganalisis dampak makroekonomi, efek pengganda sektoral, dan risiko fiskal dari kebijakan MBG melalui pendekatan ekonomi politik dan tinjauan literatur yang komprehensif.

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Efek Pengganda

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan belanja negara. Dalam perspektif ekonomi makro Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah atau government expenditure (G) dapat menciptakan tambahan permintaan agregat, mendorong peningkatan output, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Dornbusch et al., 2011, dalam Putri et al., 2026). Mekanisme tersebut bekerja melalui efek pengganda atau multiplier effect, yaitu kondisi

ketika injeksi belanja pemerintah menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan nilai belanja awal karena adanya perputaran pendapatan dan konsumsi di dalam perekonomian.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan fiskal ekspansif karena menggunakan belanja negara dalam skala besar untuk membiayai penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran. Pengeluaran pemerintah melalui program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan rantai pasok pangan. Belanja MBG diproyeksikan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian, peternakan, industri pengolahan makanan, jasa distribusi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG berpotensi menciptakan siklus pendapatan baru di tingkat rumah tangga, pelaku usaha, dan perekonomian daerah.

Efektivitas efek pengganda sangat dipengaruhi oleh marginal propensity to consume (MPC), yaitu kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan tambahan pendapatan yang diterima. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah umumnya memiliki MPC yang lebih tinggi karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, termasuk pangan (BAPPENAS, 1999). Oleh karena itu, apabila belanja MBG benar-benar menjangkau kelompok rentan dan melibatkan rantai pasok lokal, maka program ini berpotensi menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas. Untuk memperkuat efek tersebut, pemerintah menargetkan sebagian besar pengadaan barang dan jasa dalam Program MBG bersumber dari produk pertanian dan UMKM lokal, sehingga kebocoran ekonomi akibat ketergantungan impor dapat ditekan (Kementerian UMKM, 2025). Secara konseptual, desain ini mengubah belanja konsumtif negara menjadi instrumen produktif yang mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya (Beruh & Lusiana, 2026).

Akuntansi Rumah Tangga dan Transfer Natura

Akuntansi rumah tangga atau household accounting memandang keluarga sebagai unit ekonomi yang melakukan pengelolaan atas penerimaan, pengeluaran, tabungan, dan alokasi sumber daya domestik. Dalam konteks ini, rumah tangga tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang mengambil keputusan berdasarkan keterbatasan pendapatan dan prioritas kebutuhan. Pengeluaran untuk makanan anak merupakan salah satu komponen konsumsi rutin yang harus dikelola oleh keluarga, terutama bagi rumah tangga dengan anak usia sekolah.

Program MBG dapat dikategorikan sebagai transfer natura atau in-kind transfer karena bantuan yang diberikan bukan berupa uang tunai, melainkan makanan bergizi yang langsung ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik penerima manfaat. Secara teoritis, transfer natura memiliki keunggulan dibandingkan bantuan tunai dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang ditargetkan, dalam hal ini pemenuhan gizi anak (Alderman & Yemtsov, 2014, dalam Putri et al., 2026). Melalui mekanisme tersebut, negara mengambil alih sebagian biaya konsumsi pangan anak yang sebelumnya ditanggung oleh rumah tangga.

Dari sudut pandang akuntansi rumah tangga, pengambilalihan biaya makan anak oleh negara berpotensi menciptakan penghematan kas atau cash saving. Penghematan ini dapat meningkatkan sisa pendapatan siap pakai atau disposable income yang kemudian dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, tabungan, pembayaran utang, atau perbaikan konsumsi pangan di rumah. Namun, besaran manfaat yang diterima oleh setiap rumah tangga tidak selalu sama. Rumah tangga miskin cenderung memiliki keterbatasan dalam nominal belanja pangan sebelum adanya program, sedangkan rumah tangga menengah-atas umumnya memiliki pengeluaran konsumsi yang lebih besar dan lebih fleksibel. Perbedaan struktur pengeluaran tersebut menyebabkan dampak MBG terhadap penghematan kas rumah tangga perlu dianalisis berdasarkan stratifikasi pendapatan.

Ekonomi Politik dan Risiko Fiskal

Meskipun Program MBG memiliki potensi sebagai instrumen perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, implementasinya tidak dapat dilepaskan dari risiko ekonomi politik dan keberlanjutan fiskal. Dalam perspektif ekonomi politik, program berskala besar yang lahir dari janji politik berpotensi mengalami instrumentalisasi, terutama ketika kebijakan tersebut digunakan sebagai

simbol keberhasilan politik jangka pendek. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko predatory budgeting, yaitu penggunaan anggaran negara secara besar-besaran untuk program populis yang berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi belanja struktural lain yang juga penting bagi pembangunan manusia.

Besarnya alokasi APBN untuk Program MBG menimbulkan persoalan trade-off fiskal. Ketika anggaran negara diarahkan dalam jumlah besar untuk membiayai penyediaan makanan gratis, terdapat risiko berkurangnya porsi anggaran bagi sektor lain, seperti beasiswa pendidikan, peningkatan kualitas sarana sekolah, bantuan operasional pendidikan, layanan kesehatan preventif, dan kesejahteraan tenaga pendidik (Masruri & Nugraha, 2026; Askar et al., 2025). Oleh sebab itu, keberhasilan MBG tidak hanya perlu dinilai dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, kualitas tata kelola, dan dampaknya terhadap keberlanjutan APBN.

Selain risiko fiskal, implementasi MBG juga berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi di tingkat lokal. Pengadaan bahan pangan dalam jumlah besar dapat mendorong peningkatan permintaan secara tiba-tiba di pasar daerah. Apabila kapasitas produksi lokal tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan tersebut, harga bahan pangan dapat meningkat dan memicu demand-pull inflation. Kenaikan harga ini berpotensi membebani rumah tangga miskin, terutama kelompok yang tidak terlibat langsung dalam rantai pasok program. Selain itu, model pelaksanaan yang terlalu sentralistik dapat menimbulkan persoalan logistik, keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian menu, rendahnya kualitas makanan, serta munculnya biaya tersembunyi atau hidden costs ketika orang tua tetap harus membeli makanan tambahan karena anak tidak mengonsumsi menu MBG secara optimal (Askar et al., 2025).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori kebijakan fiskal ekspansif, Program MBG berpotensi menciptakan efek pengganda melalui peningkatan belanja pemerintah pada sektor pangan dan UMKM lokal. Pada saat yang sama, berdasarkan perspektif akuntansi rumah tangga, program ini dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk konsumsi anak dan menciptakan penghematan kas. Namun, penghematan tersebut diduga tidak terdistribusi secara merata pada seluruh kelompok pendapatan.

Rumah tangga berpendapatan rendah umumnya mengalokasikan persentase pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan pangan. Akan tetapi, secara nominal, kemampuan mereka dalam menyediakan bekal atau konsumsi tambahan bagi anak cenderung terbatas. Sebaliknya, rumah tangga menengah-atas memiliki pengeluaran konsumsi yang lebih besar, termasuk untuk makanan dengan kualitas, variasi, atau preferensi tertentu. Ketika negara menyediakan makan gratis secara universal, kelompok menengah-atas berpotensi memperoleh penghematan nominal yang lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan keluarga diduga memiliki hubungan dengan besaran penghematan anggaran konsumsi bulanan akibat implementasi Program MBG.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Terdapat hubungan asosiatif yang signifikan antara tingkat pendapatan rutin keluarga dan besaran penghematan anggaran konsumsi bulanan rumah tangga akibat intervensi Program Makan Bergizi Gratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain mixed-methods yang menggabungkan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitis dengan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk menguji hubungan empiris antara tingkat pendapatan rumah tangga dan besaran penghematan kas akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga untuk memahami dampak makroekonomi, efek pengganda sektoral, serta risiko fiskal yang ditimbulkan oleh implementasi program tersebut. Dengan demikian, desain mixed-methods memungkinkan analisis dilakukan secara lebih komprehensif, baik pada level mikro rumah tangga maupun pada level makro kebijakan fiskal nasional.

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak langsung Program MBG terhadap struktur akuntansi rumah tangga. Data yang digunakan merupakan data primer dari survei lapangan terhadap 585 kepala keluarga yang memiliki anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Keerom,

khususnya pada wilayah Arso Barat, Arso, dan Bagia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga, sedangkan fokus pengamatan diarahkan pada hubungan antara tingkat pendapatan rutin keluarga dan besaran penghematan pengeluaran konsumsi setelah adanya intervensi Program MBG. Variabel pendapatan keluarga diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok pendapatan bulanan, sedangkan variabel penghematan kas dikategorikan berdasarkan nominal penghematan yang diperoleh rumah tangga dari berkurangnya biaya konsumsi pangan anak.

Pengujian data kuantitatif dilakukan dengan pendekatan non-parametrik menggunakan Pearson's Chi-Square Test. Uji ini digunakan karena variabel yang dianalisis berbentuk kategorikal, yaitu kategori tingkat pendapatan bulanan keluarga dan kategori nominal penghematan kas rumah tangga. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak RStudio untuk mengetahui apakah terdapat hubungan asosiatif yang signifikan antara tingkat pendapatan keluarga dan besaran penghematan anggaran konsumsi bulanan akibat implementasi Program MBG. Hasil pengujian kemudian digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan pola distribusi manfaat fiskal pada berbagai stratifikasi pendapatan rumah tangga.

Selain analisis kuantitatif mikroekonomi, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk mengevaluasi dampak makroekonomi dan risiko fiskal Program MBG. Data sekunder diperoleh dari berbagai laporan kebijakan, publikasi akademik, dan kajian lembaga riset, seperti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Badan Pusat Statistik (BPS), serta kajian berbasis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Literatur tersebut digunakan untuk memetakan efek pengganda sektoral, potensi peningkatan pendapatan agregat, risiko inflasi pangan lokal, persoalan ketepatan sasaran, serta keberlanjutan ruang fiskal APBN dalam pembiayaan Program MBG (Askar et al., 2025; Pratiwi et al., 2025).

Data yang diperoleh dari analisis kuantitatif dan studi kepustakaan kemudian diinterpretasikan secara integratif. Hasil uji statistik digunakan untuk menjelaskan dampak MBG pada level rumah tangga, sedangkan telaah literatur digunakan untuk memperluas pemahaman terhadap implikasi program pada level ekonomi makro dan tata kelola fiskal. Melalui strategi analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas Program MBG sebagai instrumen penghematan rumah tangga, sekaligus menilai sejauh mana program ini berkontribusi terhadap efek pengganda ekonomi dan ketahanan fiskal nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efek Pengganda Sektoral pada Makroekonomi

Hasil analisis makroekonomi menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi untuk menciptakan efek pengganda atau multiplier effect pada rantai pasok domestik. Sebagai kebijakan fiskal ekspansif, MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial dalam pemenuhan gizi anak, tetapi juga sebagai instrumen belanja pemerintah yang dapat mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor produktif. Berdasarkan simulasi investasi menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dengan nilai anggaran sebesar Rp71 triliun, Program MBG diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan agregat, terutama pada sektor industri pengolahan makanan dan minuman, sektor pertanian, serta sektor jasa pemerintahan (Pratiwi et al., 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan analisis INDEF yang memperkirakan bahwa belanja MBG pada tahun 2025 berpotensi memberikan tambahan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,06% hingga 0,10%, atau setara dengan Rp14,61 triliun pada harga berlaku. Selain itu, program ini juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 0,82 juta tenaga kerja langsung melalui aktivitas produksi, distribusi, dan penyediaan makanan (INDEF, 2024, dalam Putri et al., 2026). Dengan demikian, MBG dapat dilihat sebagai kebijakan yang memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi perlindungan sosial dan dimensi stimulus ekonomi.

Efek pengganda tersebut semakin kuat apabila pengadaan bahan pangan benar-benar bersumber dari produk lokal. Kementerian UMKM melaporkan bahwa pada tahap awal implementasi, sebanyak 6.435 UMKM telah terlibat sebagai pemasok dalam rantai pasok MBG. Kebijakan yang mewajibkan sebagian besar bahan baku bersumber dari produk lokal berpotensi menekan kebocoran ekonomi dan memperkuat perputaran uang di daerah (Kementerian UMKM, 2025). Dalam konteks wilayah agraris, seperti Kabupaten Aceh Tenggara, operasional dapur MBG dapat memberikan

kepastian pasar bagi komoditas lokal, seperti beras, telur, sayuran, dan bahan pangan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja negara yang awalnya bersifat konsumtif dapat ditransformasikan menjadi belanja produktif apabila dikelola melalui rantai pasok yang inklusif dan berbasis ekonomi lokal (Beruh & Lusiana, 2026).

Meskipun demikian, besarnya efek pengganda MBG sangat bergantung pada desain tata kelola pengadaan. Apabila pengadaan didominasi oleh vendor besar dan tidak melibatkan petani, koperasi, BUMDes, serta UMKM lokal secara proporsional, maka dampak ekonomi daerah berpotensi menjadi terbatas. Oleh karena itu, keberhasilan MBG sebagai instrumen stimulus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan agar aliran belanja program benar-benar berputar di tingkat lokal.

Analisis Akuntansi Rumah Tangga: Diferensiasi Penghematan Kas di Arso

Pada level mikro, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG berdampak terhadap struktur akuntansi rumah tangga, khususnya dalam bentuk penghematan pengeluaran konsumsi anak. Namun, manfaat penghematan tersebut tidak terdistribusi secara merata pada seluruh kelompok pendapatan. Berdasarkan hasil pengujian Pearson's Chi-Square terhadap 585 sampel rumah tangga di wilayah Arso, diperoleh nilai $\chi^2 = 37,683$ dengan $p\text{-value} = 0,000043$. Nilai $p\text{-value}$ yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan asosiatif yang sangat signifikan antara tingkat penghasilan rutin keluarga dan besaran penghematan anggaran konsumsi bulanan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan antara pendapatan keluarga dan penghematan kas akibat intervensi Program MBG dapat diterima.

Hasil kontingensi data memperlihatkan adanya paradoks akuntansi rumah tangga. Pada kelompok berpendapatan rendah, yaitu rumah tangga dengan pendapatan kurang dari Rp1.000.000 per bulan, mayoritas keluarga hanya mencatatkan penghematan dalam skala mikro, yaitu kurang dari Rp50.000 per bulan. Persentase rumah tangga pada kelompok ini yang mengalami penghematan kecil berada pada kisaran 70,41% hingga 72,15%. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui keterbatasan kapasitas belanja sebelum adanya MBG. Rumah tangga miskin pada umumnya telah menekan biaya konsumsi anak pada tingkat seminimal mungkin, sehingga ketika negara menyediakan makanan gratis, nominal penghematan kas yang tercatat tidak terlalu besar. Namun, meskipun nilai penghematan secara nominal kecil, manfaat sosial dan psikologis yang diperoleh tetap penting karena program ini membantu mengurangi tekanan pengeluaran harian dan berpotensi meningkatkan akses anak terhadap makanan bergizi.

Sebaliknya, kelompok rumah tangga menengah-atas menunjukkan pola penghematan yang berbeda. Pada kelompok dengan pendapatan Rp3.000.000 hingga lebih dari Rp4.000.000 per bulan, persentase keluarga yang mampu mencatatkan surplus kas lebih dari Rp100.000 per bulan mencapai 18,52%. Kelompok ini memiliki fleksibilitas daya beli yang lebih tinggi dan sebelumnya cenderung mengeluarkan biaya lebih besar untuk bekal atau konsumsi anak. Ketika makan siang anak ditanggung oleh negara melalui Program MBG, sebagian pengeluaran tersebut berubah menjadi idle cash atau surplus kas rumah tangga. Dengan kata lain, program universal seperti MBG berpotensi menghasilkan penghematan nominal yang lebih besar bagi kelompok yang sebelumnya memang memiliki pengeluaran konsumsi lebih tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa Program MBG menciptakan efek penghematan yang bersifat tidak simetris. Bagi rumah tangga miskin, MBG lebih berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan instrumen pemenuhan gizi dasar. Sementara itu, bagi rumah tangga menengah-atas, MBG dapat berfungsi sebagai mekanisme peningkatan likuiditas karena mengurangi sebagian pengeluaran konsumsi yang sebelumnya telah tersedia dalam anggaran rumah tangga. Dengan demikian, meskipun MBG memberikan manfaat pada seluruh kelompok, desain universal program ini berpotensi menimbulkan ketimpangan manfaat fiskal karena kelompok dengan kapasitas konsumsi lebih tinggi justru dapat menikmati penghematan nominal yang lebih besar. Temuan ini sejalan dengan analisis Pratiwi et al. (2025) yang menyatakan bahwa dampak MBG terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan cenderung marginal apabila tidak disertai dengan mekanisme penargetan yang lebih presisi.

Beban Ekonomi Tersembunyi dan Risiko Inflasi Lokal

Efektivitas Program MBG juga dipengaruhi oleh munculnya beban ekonomi tersembunyi atau hidden costs. Secara konseptual, MBG dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, penghematan tersebut dapat berkurang apabila kualitas, porsi, higienitas, atau variasi menu tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Survei nasional CELIOS menunjukkan bahwa 44,2% responden, terutama dari kelompok pendapatan menengah Rp2.000.000 hingga Rp10.000.000 per bulan, menyatakan bahwa MBG tidak secara signifikan meringankan beban ekonomi keluarga (Askar et al., 2025). Salah satu penyebabnya adalah adanya pengeluaran tambahan untuk membeli makanan pengganti ketika anak tidak mengonsumsi menu MBG karena alasan kualitas, rasa, porsi, atau kebersihan.

Fenomena hidden costs ini penting diperhatikan karena dapat mengurangi efektivitas MBG sebagai instrumen penghematan rumah tangga. Apabila orang tua tetap harus membeli makanan tambahan, maka biaya konsumsi anak tidak sepenuhnya berkurang. Bahkan, bagi rumah tangga miskin, biaya substitusi tersebut dapat menjadi beban baru yang menggerus manfaat program. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga harus dilihat dari tingkat konsumsi aktual anak, kualitas menu, kecukupan porsi, dan kemampuan program menggantikan pengeluaran makan yang sebelumnya ditanggung rumah tangga.

Selain hidden costs, implementasi MBG juga berpotensi memicu risiko inflasi lokal. Injeksi anggaran dalam jumlah besar pada sektor pangan dapat meningkatkan permintaan bahan baku secara tiba-tiba. Apabila peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi oleh kesiapan produksi dan distribusi lokal, maka harga bahan pangan di pasar tradisional berpotensi meningkat. CELIOS mencatat bahwa 36,07% pekerja informal dan pedagang kecil mengeluhkan kenaikan harga bahan pangan akibat peningkatan pembelian agregat dari dapur-dapur besar yang tersentralisasi (Askar et al., 2025). Kenaikan harga ini dapat menciptakan paradoks, yaitu program yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat justru berpotensi menekan daya beli kelompok rentan yang tidak memperoleh manfaat langsung dari rantai pasok MBG.

Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah dampak terhadap pelaku usaha kecil di sektor penyediaan makanan. Model dapur sentralistik berpotensi mengurangi permintaan terhadap pedagang kantin sekolah, katering kecil, dan penyedia makanan keliling. Dalam skenario terburuk, CELIOS memperkirakan adanya risiko kehilangan pekerjaan pada sektor penyediaan makanan dalam jumlah yang signifikan (Askar et al., 2025). Oleh karena itu, implementasi MBG perlu dirancang agar tidak hanya menciptakan permintaan baru bagi pemasok besar, tetapi juga melindungi dan melibatkan pelaku usaha kecil yang selama ini telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi sekolah.

Analisis Fiskal, Ekonomi Politik, dan Tata Kelola

Dari perspektif keberlanjutan fiskal, Program MBG menimbulkan tantangan serius karena membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. Pagu anggaran MBG sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025 dan proyeksi peningkatan hingga Rp335 triliun pada tahun 2026 menunjukkan adanya tekanan signifikan terhadap ruang fiskal APBN. Alokasi tersebut diperkirakan menyerap sekitar 9% hingga 10% dari total anggaran pendidikan nasional, sehingga menciptakan trade-off atau opportunity cost terhadap program pendidikan dan pembangunan manusia lainnya (Masruri & Nugraha, 2026). Dalam konteks ini, MBG perlu dinilai bukan hanya dari manfaat langsungnya, tetapi juga dari konsekuensi fiskal jangka panjang yang mungkin timbul.

Studi CELIOS memproyeksikan bahwa skema penargetan universal berpotensi menimbulkan inclusion error sebesar 34,2%. Akibatnya, negara berisiko mengalami pemborosan anggaran sekitar Rp8,4 triliun per tahun karena sebagian manfaat diterima oleh kelompok yang sebenarnya tidak berada dalam kategori prioritas. Jika anggaran tersebut dialokasikan secara lebih presisi pada program pencegahan stunting, terutama intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan, manfaat ekonomi jangka panjang yang dihasilkan diperkirakan jauh lebih besar (Askar et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran merupakan aspek penting dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan fiskal Program MBG.

Dari sudut pandang ekonomi politik, MBG juga rentan terhadap praktik predatory budgeting, yaitu ketika anggaran negara diarahkan secara dominan pada program populis jangka pendek hingga

mengurangi kapasitas pembiayaan program struktural lainnya. Risiko ini muncul karena MBG merupakan program besar yang memiliki nilai politik tinggi dan mudah dikapitalisasi sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Namun, apabila pembiayaannya menggeser anggaran strategis lain, seperti KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah, peningkatan sarana pendidikan, program kesehatan preventif, dan kesejahteraan tenaga pendidik, maka manfaat jangka panjang pembangunan manusia justru dapat terganggu (Masruri & Nugraha, 2026; Askar et al., 2025).

Aspek tata kelola juga menjadi faktor penentu keberhasilan Program MBG. Pelaksanaan program dalam skala nasional membutuhkan sistem logistik yang kuat, standar mutu makanan yang ketat, pengawasan higienitas, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, UMKM, dan pemasok lokal. Lemahnya cold chain, keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan dan daerah 3T, serta belum optimalnya evaluasi independen dapat meningkatkan risiko keterlambatan distribusi, penurunan kualitas makanan, bahkan kasus keracunan massal. Selain itu, tanpa sistem pengawasan yang transparan, program ini juga rentan terhadap praktik patronase lokal, dominasi vendor besar, dan penyimpangan anggaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar, tetapi juga membawa risiko implementasi yang kompleks. Pada level makro, MBG dapat mendorong efek pengganda melalui sektor pangan, pertanian, UMKM, dan logistik. Pada level mikro, program ini menciptakan penghematan kas rumah tangga, tetapi manfaat nominalnya cenderung lebih besar dinikmati oleh kelompok menengah-atas. Di sisi lain, hidden costs, inflasi pangan lokal, salah sasaran penerima manfaat, dan tekanan terhadap APBN menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, efektivitas MBG sangat bergantung pada desain kebijakan yang lebih tepat sasaran, tata kelola pengadaan yang desentralistik, pelibatan pelaku lokal, serta pengawasan mutu yang ketat.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan fiskal ekspansif yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan mendorong aktivitas ekonomi nasional. Secara konseptual, program ini mampu menciptakan efek pengganda bagi sektor pertanian, industri pengolahan pangan, jasa logistik, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui peningkatan permintaan terhadap bahan pangan lokal, MBG dapat menjadi instrumen stimulus ekonomi yang memperkuat rantai pasok domestik dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah.

Pada level rumah tangga, hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG berpengaruh terhadap struktur akuntansi ekonomi keluarga melalui terbentuknya ruang penghematan kas atau disposable income baru. Namun, penghematan tersebut tidak terdistribusi secara merata pada seluruh kelompok pendapatan. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung memperoleh manfaat dalam bentuk perlindungan sosial dan peningkatan akses gizi anak, tetapi nominal penghematan kas yang dicatat relatif kecil. Sebaliknya, kelompok rumah tangga menengah-atas memiliki potensi memperoleh surplus likuiditas yang lebih besar karena sebelum adanya MBG mereka telah memiliki pengeluaran konsumsi anak yang lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan adanya ironi dalam keadilan fiskal, yaitu ketika program universal yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan justru dapat memberikan manfaat nominal yang lebih besar kepada kelompok dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi.

Selain itu, efektivitas Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan implementasi. Lemahnya standardisasi mutu makanan, keterbatasan sistem pengawasan, dan model logistik yang cenderung sentralistik berpotensi menimbulkan biaya tersembunyi atau hidden costs bagi rumah tangga. Biaya tersebut muncul ketika orang tua tetap harus membeli makanan tambahan karena anak tidak mengonsumsi menu MBG secara optimal akibat persoalan kualitas, porsi, higienitas, atau variasi makanan. Di sisi lain, peningkatan permintaan bahan pangan dalam jumlah besar juga berisiko memicu inflasi lokal apabila tidak diimbangi dengan kesiapan produksi dan distribusi pangan daerah.

Dari perspektif fiskal, besarnya kebutuhan anggaran MBG menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan APBN. Program ini berpotensi menciptakan trade-off dengan anggaran pembangunan manusia lainnya, terutama sektor pendidikan, kesehatan preventif, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas layanan publik. Apabila tidak dikelola dengan prinsip efisiensi, ketepatan sasaran,

dan tata kelola yang transparan, MBG dapat bergeser dari instrumen investasi modal manusia jangka panjang menjadi program populis yang membebani ruang fiskal negara. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya alokasi anggaran dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari ketepatan sasaran, mutu layanan, keberlanjutan fiskal, serta kemampuan program menciptakan manfaat ekonomi yang adil bagi kelompok rentan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap desain universal Program MBG dan mempertimbangkan transisi menuju sistem penargetan yang lebih presisi. Penargetan program sebaiknya diprioritaskan kepada keluarga pada desil pendapatan bawah, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok dengan risiko stunting tinggi, seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah dari keluarga miskin. Pendekatan ini penting untuk menekan risiko inclusion error dan memastikan bahwa anggaran negara benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan skema bantuan berbasis kebutuhan, seperti nutrition voucher atau mekanisme subsidi pangan bergizi yang terintegrasi dengan data sosial ekonomi rumah tangga.

Pemerintah juga perlu memperkuat desentralisasi rantai pasok Program MBG dengan melibatkan BUMDes, koperasi, petani lokal, kelompok ternak, nelayan, dan UMKM pangan sebagai aktor utama dalam pengadaan bahan baku. Desain pengadaan yang berbasis lokal dapat memperbesar efek pengganda ekonomi karena uang negara tidak hanya berhenti pada vendor besar, tetapi berputar di tingkat desa dan daerah. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program konsumsi publik, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang memperkuat produksi pangan daerah.

Selain itu, pengawasan mutu makanan harus menjadi prioritas utama dalam implementasi MBG. Pemerintah perlu membangun sistem monitoring terpadu berbasis digital yang melibatkan ahli gizi puskesmas, sekolah, komite orang tua, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas independen. Sistem ini harus memastikan bahwa menu yang diberikan memenuhi standar gizi, higienitas, kecukupan porsi, keamanan pangan, dan kesesuaian dengan kebutuhan anak. Pengawasan mutu yang kuat sangat penting untuk mencegah munculnya hidden costs, karena manfaat penghematan rumah tangga hanya akan optimal apabila anak benar-benar mengonsumsi makanan yang disediakan oleh program.

Dari sisi fiskal, pemerintah dan DPR perlu menetapkan mekanisme proteksi anggaran agar pembiayaan MBG tidak mengorbankan program pendidikan dan pembangunan manusia lainnya. Kenaikan pagu MBG harus disertai dengan evaluasi biaya-manfaat, audit kinerja, dan indikator keberhasilan yang terukur. Program strategis seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), KIP Kuliah, peningkatan sarana prasarana pendidikan di wilayah 3T, kesejahteraan guru, serta layanan kesehatan preventif tidak boleh mengalami kanibalisasi anggaran akibat ekspansi MBG. Dengan adanya proteksi fiskal tersebut, MBG dapat tetap berjalan sebagai investasi gizi dan modal manusia tanpa melemahkan fondasi pembangunan struktural lainnya.

Terakhir, diperlukan evaluasi independen secara berkala untuk menilai efektivitas Program MBG dari aspek ekonomi, sosial, gizi, tata kelola, dan keberlanjutan fiskal. Evaluasi tersebut perlu berbasis data empiris, mencakup variasi wilayah, serta membandingkan manfaat yang diterima oleh berbagai kelompok pendapatan. Dengan evaluasi yang transparan dan berkelanjutan, pemerintah dapat memperbaiki desain program secara adaptif sehingga MBG benar-benar menjadi kebijakan publik yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alderman, H., & Yemtsov, R. (2014). How can safety nets contribute to economic growth? *The World Bank Economic Review*, 28(1), 1–20.
- Askar, M. W., Arifin, M., & Assyayuti, M. M. (2025). *Yang lapar siapa? Yang kenyang siapa? Mitigasi risiko Program Makan Bergizi Gratis*. Center of Economic and Law Studies.
- Askar, M. W., Hidayah, I., Fikri, B., Darmawan, J., Lianasari, A., Muhammad, G. D., & Lestari, R. D. (2025). *Makan (tidak) bergizi (tidak) gratis*. Center of Economic and Law Studies.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (1999). *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia*. BAPPENAS.

- Beruh, M. K. A., & Lusiana, L. (2026). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan implikasi sosial, ekonomi, dan politik terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia. *Indonesian Social Science Review*, 4(1), 59–67.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2011). *Macroeconomics* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum*. FAO.
- Institute for Development of Economics and Finance. (2024). *Efek pengganda Program Makan Bergizi Gratis*. INDEF.
- Jati, A. K., Azhar, & Iriani, A. (2025). Formulasi kebijakan pemerintah tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 700–711.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku saku hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Pelibatan UMKM dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia. (2026). *Proyeksi dampak ekonomi dan fiskal Program Makan Bergizi Gratis*. LPEM UI.
- Masruri, G. G., & Nugraha, H. (2026). Program Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen politik janji pemilu: Analisis kebijakan anggaran dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 12100–12108.
- Pratiwi, P. Z., Sahara, & Azijah, Z. (2025). *Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap pendapatan sektoral dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia*. IPB University Scientific Repository.
- Putri, R. S., Faza, Y., Shabirah, S., Kuswanto, N. A., Dzakira, Z. S., & Nuraya, A. S. (2026). The Free Nutritious Meal (MBG) Program from the perspective of fiscal policy. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economics and Business*, 8(2), 9346–9364.